

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

**SISTEM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA LEMBAGA INSPEKTORAT
KABUPATEN BULELENG**

**Oleh :
Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika
Universitas Pendidikan Ganesha**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan adalah data kualitatif, berupa sistem pembuatan laporan keuangan SKPD, catatan yang digunakan, dokumen pendukung, struktur organisasi serta fungsi dan tugasnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik. Sistem pembuatan laporan keuangan SKPD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang berdasarkan SP2D, SPJ dan Bukti Transaksi yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran. Sistem pembuatan laporan keuangan SKPD dimulai dari penerimaan SP2D, SPJ Pengeluaran Kas dan Bukti Transaksi melalui proses pemeriksaan, pencatatan, sampai penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem, Laporan Keuangan, SKPD.

ABSTRACT

This study aims to determine the financial reporting system of the district unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah =SKPD) in Inspectorate institutions of Buleleng Regency. The data used is qualitative data , such as financial reporting system of SKPD, which used records, supporting documents, organizational structures, functions and duties . Data collection techniques used were interview , observation, and documentation then analyzed using qualitative descriptive analysis method . The results showed that the system of financial reporting district unit (SKPD) in Buleleng Inspectorate has been performing well. Financial reporting system of SKPD through the Financial Administration officials are based SP2D , SPJ and the evidence given by the treasurer. The expenses of financial reporting system start from receipt SP2D , SPJ cash expenditures and proof of transactions through the process of inspection, recording, until the preparation of the financial statements.

Keywords : Systems , Financial Statements , SKPD .

1. PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama satu periode. Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah).

Ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kebijakan dibidang akuntansi yang diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dimana Kepala Daerahnya adalah Bupati Buleleng, untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Buleleng, namun dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Ada perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi biasanya, seperti laporan laba rugi terdapat pada

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

laporan keuangan akuntansi umum sedangkan pada laporan keuangan Inspektorat tidak ada laporan laba rugi sehingga penyusun tertarik untuk mengetahui sistem pembuatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Dari latar belakang yang dimaksud diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagi Mahasiswa, Melalui penelitian ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu - ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan terutama dalam bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai sistem pembuatan laporan keuangan SKPD pada Inspektorat Kabupaten Buleleng. (2) Bagi Instansi (UNDIKSHA SINGARAJA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature di perpustakaan, sehingga dapat dipakai sebagai perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang terutama pada pembuatan sistem pembuatan laporan keuangan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. (3) Bagi Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga sistem pembuatan laporan keuangan SKPD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan,

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah : (1) Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna (*relevance*) , lengkap, dan terpercaya (akurat). (2) Untuk meningkatkan kualitas *internal check* atau pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada Inspektorat terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : (1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Dimana tim anggaran pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Buleleng merupakan Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Buleleng. Inspektorat Kabupaten Buleleng bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam petanggungjawabannya, sangat diperlukan suatu sistem laporan, yaitu Sistem Pembuatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng. Pada lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng yang bertugas dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan SKPD adalah

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKP), sistem pembuatan laporan keuangan SKPD di mulai dari penerimaan dokumen SP2D, SPJ dilampiri bukti transaksi, dan Bukti Memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, akan dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal. Setelah transaksi di catat dalam buku jurnal, selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar yang dijadikan dasar untuk membuat nerca saldo. Berdasarkan neraca saldo, Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu mengenai sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng, di mana yang menjadi subyek penelitian adalah bagian umum, bagian Keuangan dan bagian Program Evaluasi Pelaporan pada Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Langkah awal yang dilakukan yaitu menetapkan lokasi penelitian serta menetapkan metode pengumpulan data. Dimana penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.152 Singaraja, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yaitu metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Dari data wawancara dan observasi akan diperoleh data berupa data primer dan data sekunder, sedangkan dari metode dokumentasi akan diperoleh data berupa formulir-formulir yang berhubungan dengan sistem pembuatan laporan keuangan dan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapat maka nantinya akan diperoleh simpulan penelitian. Adapun langkah – langkah peneliitian, sebagai berikut : Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor.152 telepon (0362) 21144 Singaraja. Subyek dalam penelitian ini adalah Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng yaitu : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sistem pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan dalam penerlitian ini yaitu data kualitatif. Data

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

kualitatif merupakan data yang tidak dapat dihitung dan tidak berupa angka-angka seperti sistem laporan keuangan, dokumen pendukung serta catatan yang digunakan. Sumber Data terdiri dari : (1) Data Primer. Menurut adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. (2) Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data primer yang telah diolah media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti formulir-formulir dan dokumen lain yang digunakan dalam sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada Lembaga Inspektorat Kabupaten Buleleng .

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah tehnik pengumpulan data dengan metode : (a) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Dalam penelitian ini, misalnya dengan bertanya kepada Kepala Sub Bagian dan pegawai di bagian Keuangan dan Tata Usaha pada Inspektorat Kabupaten Buleleng mengenai sistem pembuatan laporan keuangan dan beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pembuatan laporan keuangan. (b) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Seperti mengamati bagian yang terlibat dalam laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng. (c) Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dali-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Misalnya melakukan pengumpulan lampiran atau data-data mengenai laporan keuangan.

Tehnik analisis data yang digunakan adalah Tehnik Analisis Deskriptif Kualitatif yang merupakan metode untuk mengolah data yang didapat kemudian akan diuraikan, digambarkan, atau dipaparkan berdasarkan informasi dari masalah yang diangkat mengenai empat unsur, yaitu : Dokumen yang digunakan dalam sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, Catatan akuntansi yang digunakan, Laporan yang terkait dengan sistem pembuatan

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, dan Bagan Alir (*Flow Chart*) sistem pembuatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Secara umum Inspektorat Kabupaten Buleleng diwarnai oleh pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentu memerlukan anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Peraturan Bupati Buleleng tersebut dijelaskan bagaimana mengenai proses pengelolaan keuangan dan bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah tertuang dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (l) Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng terdiri dari dokumen yang digunakan dan catatan-catatan yang digunakan. Berikut ini akan

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

dibahas masing-masing unsur dalam sistem pembuatan laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang dianggap sah untuk diakui sebagai dasar pencatatan. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah surat yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang untuk transaksi pengeluaran kas. Bukti memorial yang merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian selain kas, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran/penyetoran pajak. Nota Pesanan adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak, nota biasanya sangat dibutuhkan oleh pengusaha dagang, karena nota menjadi bukti penjualan atau pembelian suatu barang.

Catatan-catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng ialah : Buku Jurnal Umum adalah merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Buku Jurnal Pengeluaran Kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Buku Besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Untuk format laporan realisasi anggaran terdiri dari 6 kolom yaitu kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua berisi tentang uraian kerja, kolom ketiga berisi tentang anggaran, kolom keempat tentang realisasi,

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

kolom kelima tentang %, kolom keenam tentang realisasi tahun sebelumnya. (2) Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang, dan ekuitas dana. Bentuk neraca yang digunakan adalah neraca komprehensif. Format neraca SKPD terdiri dari empat kolom yaitu kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua berisi tentang uraian kerja, kolom ketiga berisi tentang saldo tahun sekarang dan kolom keempat berisi saldo tahun lalu. (3) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Untuk mempermudah proses pencatatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), maka digunakanlah aplikasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem aplikasi komputer tersebut, dapat membantu mempercepat proses input data transaksi keuangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah sistem, baik dalam lingkungan operasi online maupun offline. Modul Perencanaan, Modul aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Modul Penganggaran,

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

Modul aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran. Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan dan penatausahaan APBD, baik di tingkat Bendahara, PPK SKPD, Pengguna Anggaran maupun BUD. Modul Pertanggungjawaban, Modul aplikasi yang mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan laporan keuangan, dimulai dari Jurnal yang kemudian diposting ke buku besar, buku besar dijadikan dasar untuk membuat neraca saldo. Berdasarkan neraca saldo disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Modul ini mengakomodasi kebutuhan entitas akuntansi, baik pada tingkat SKPD, tingkat PPKD, maupun tingkat Pemerintah Daerah. Dengan demikian, modul ini dapat menghasilkan jenis-jenis laporan sesuai dengan kebutuhan pada setiap tingkatan tersebut.

Dari hasil penelitian yang didapatkan pada Inspektorat kabupaten Buleleng, sistem pembuatan laporan keuangan SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) sudah menerapkan sesuai peraturan yang ditetapkan. Ini dapat terlihat dari penjelasan diatas dimana proses akuntansi SKPD ini terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu konsep penjurnalan, posting ke buku besar, serta proses penyusunan laporan keuangan SKPD. penyusunan laporan keuangan, Ini sudah dijelaskan dalam penjelasan di atas. Tetapi sistem yang telah dijalankan pada Inspektorat tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu :

Adapun Kelebihan Proses Kerja pada Inspektorat antara lain : Setiap Bagian telah melakukan kegiatannya dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti : proses penyusunan Laporan Keuangan. Inspektorat sudah menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang sangat membantu dan mempermudah proses pencatatan bendahara pengeluaran di Inspektorat. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

auditabel. Sistem pengelolaan keuangan juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Adapun Kekurangan Proses Kerja pada Inspektorat yaitu : Dalam sistem informasi pengelolaan keuangan pada komputer kadang-kadang macet sehingga tidak bisa menginput data secara cepat ini juga menjadi kekurangan pada aplikasi komputer tersebut.

Ada perbedaan untuk kolom jurnal – jurnal yang di pakai antara lain : Untuk pembuatan jurnal umum, jurnal khusus belanja, dan jurnal korolari terdiri dari 7 kolom. Untuk jurnal umum, kolom pertama untuk tanggal, kolom kedua untuk nomor bukti masuk, kolom ketiga untuk kode rekening, kolom keempat untuk uraian kerja, kolom kelima untuk ref, kolom keenam untuk jumlah debit dan kolom ketujuh untuk jumlah kredit. Untuk jurnal khusus belanja dari kolom pertama untuk tanggal, kolom kedua untuk bukti belanja, kolom ketiga-kelima sama dengan jurnal umum, kolom keenam untuk jumlah, kolom ketujuh untuk akumulasi. Untuk jurnal korolari, bentuk jurnalnya sama dengan jurnal umum kecuali kolom kedua untuk nomor bukti keluar . Sedangkan untuk pembuatan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup terdiri dari 6 kolom. Format jurnal penyesuaian, kolom pertama untuk nomor urut, kolom kedua untuk tanggal, kolom ketiga untuk uraian kerja, kolom keempat untuk ref, kolom kelima untuk debit dan kolom keenam untuk kredit. Untuk pembuatan jurnal penutup formatnya sama dengan jurnal penyesuaian.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Sistem pembuatan laporan keuangan SKPD diawali dengan penerimaan SPJ dengan dilampiri bukti transaksi, SP2D dan bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian akan dicatat ke dalam buku jurnal termasuk jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dan di posting ke buku besar. Neraca saldo dibuat berdasarkan buku besar, dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

Sistem pembuatan laporan keuangan terdiri dari dokumen yang digunakan, dan catatan-catatan yang digunakan. Sistem pembuatan laporan keuangan SKPD dimulai dari dokumen SPJ pengeluaran kas, proses pencatatan, sampai penyusunan laporan keuangan. Dalam sistem pembuatan laporan keuangan SKPD pada Inspektorat Kabupaten Buleleng dokumen yang digunakan adalah Dokumen SPJ pengeluaran dilengkapi bukti transaksi, SP2D dan bukti memorial dan catatan-catatan yang digunakan adalah buku jurnal umum, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku besar.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai berikut : untuk bendahara pengeluaran lebih meningkatkan ketelitian terhadap penyiapan SPJ pengeluaran kas yang diajukan kepada PPK. Persiapan yang perlu ditingkatkan adalah lebih meneliti kelengkapan/bukti transaksi yang melampiri dokumen SPJ pengeluaran kas agar, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebaiknya meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Daftar Pustaka

Al. Haryono Jusup, 2005. Dasar - dasar Akuntansi. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.

Amin Wijaya Tunggal, 1996. Akuntansi Manajemen untuk Usahawan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1997. Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta : Penerbit : BPFY Yogyakarta.

Azhar, 2001. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi. <http://dSPACE.widyatama.ac.id>.

H Bodnar George dan kawan-kawan, 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Penerbit PT. Indeks.

Karhi Nisjar, 1998. Akuntansi Pemerintah. Bandung : Penerbit Mandar Maju
Kusnadi, 1999. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Luh Suwarni
I Putu Gede Diatmika

Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta : Penerbit Selemba Empat.

Mulyadi, 1993. Tujuan Sistem Akuntansi. <http://rotarimustikamaharani.ac.id>.

Revrisond Baswir, 2000. Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta.

Revrisond Baswir, 2000. Akuntansi Pemerintahan. www.repository.upi.edu.

Samryn, 2000. Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada